

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bencana banjir merupakan peristiwa tergenangnya suatu daerah yang disebabkan oleh curah hujan yang tinggi dengan kondisi topografi wilayah rendah menjadi penyebab banjir. Selain itu banjir juga dapat disebabkan oleh limpasan air permukaan (run off) yang meluap sebab volume limpasan air tersebut melebihi kapasitas pengaliran sistem drainase atau sungai.¹ Banjir juga dapat terjadi oleh 2 faktor yaitu:

1. Faktor alam seperti curah hujan, erosi dan sedimentasi, topografi dan geofisik sungai, kapasitas sungai dan drainase yang tidak memadai, penurunan tanah sehingga menyebabkan tanah tidak mampu lagi menyerap air., kerusakan bangunan pengendali banjir, dan sebagainya;
2. Faktor manusia seperti perubahan tata guna lahan, pembuangan sampah, kawasan kumuh disepanjang sungai, perencanaan sistem pengendalian banjir tidak tepat, dan sebagainya. ²

¹ Afifah Nur Anggraeni Oktaviana, 2023, “ *kajian Kerentanan Wilayah Kecamatan JatiAsih Berdasarkan Analisis Manajemen Bencana*”, Tesis, Institut Teknologi Sains Bandung.

² Agus Taryana et al., 2022, “ Analisis Kesiapsiagaan Bencana Banjir Di Jakarta”, *Jurnal Administrasi Negara*), Vol13/No-02/Februari/2022, hlm. 303.

Dalam lima tahun terakhir, Kota Bekasi telah mengalami dua banjir besar, yakni pada tahun 2020 dan 2025 yang membuat kerusakan lingkungan berpotensi cukup tinggi.³ Walaupun keduanya disebabkan oleh hujan ekstrem dan perbedaan pola curah hujan, tetapi bencana banjir yang terjadi juga dapat terjadi oleh aktivitas manusia (non-alam) yaitu adanya permukaan tanah disekitar aliran sungai ditutupi oleh semen dan beton untuk permukiman masyarakat yang membuat air tidak mampu mengalir dengan lancar ke sungai sebagai penampung air hujan, membuang sampah tidak pada tempatnya, perilaku masyarakat tersebut berdampak sangat besar terhadap lingkungan.

Kota Bekasi merupakan bagian dari Megapolitan Jabodetabek dan menjadi kota dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia.⁴ Karena memiliki jumlah penduduk terbanyak, saat ini Kota Bekasi berkembang menjadi tempat tinggal urban dan sentra industri yang mengakibatkan pemanfaatan ruang di Kota Bekasi menjadi tidak kondusif, salah satunya pemanfaatan ruang kawasan di Sungai Bekasi. Daerah Aliran Sungai Berdasarkan Pasal 1 Butir 1 Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai menyatakan bahwa suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas

³ Anggrini mely, Dosen Meteorologi ITB Ungkap Fakta Banjir Bekasi 2025: Tanggul Tak Lagi Cukup, <https://share.google/wQwbCpOIUoDP1qg2Z> , diakses 28 September 2025.

⁴ Hapsari Yuushiina Dini, 2014, *Bekasi Cycling Center*, Tesis, Universitas Diponegoro.

daratan.” Berdasarkan kenyataan yang terjadi di Kota Bekasi masih banyak puluhan permukiman warga dan kegiatan usaha yang dibangun di bantaran sungai yang menjadi salah satu permasalahan yang dihadapi. Tetapi hal tersebut tidak membuat masyarakat Bekasi meninggal tempat tinggal mereka karena masyarakat tersebut lebih mengutamakan kedekatan dengan lokasi tempat usaha atau mata pencaharian dibandingkan dengan bahaya banjir, sehingga DAS di kawasan sungai Bekasi saat musim penghujan selalu terjadi banjir.

Sungai Di Kota Bekasi mencakup DAS seluas Kurang lebih 389 KM² dengan panjang sungai kurang lebih dari 80 KM.⁵ Kota Bekasi terletak pada 3 DAS besar, yaitu DAS Bekasi, DAS Cakung, dan DAS Sunter, diantara DAS tersebut DAS Bekasi yang paling sering terjadi banjir, yang dimana DAS tersebut dibagi menjadi Sub-DAS Cikeas dan Sub-DAS Cileungsi.⁶ Dampak negatif yang terjadi yaitu masyarakat membuang sampah pada aliran sungai dan tepi sungai, pencemaran sungai akibat sampah dan limbah bekas penduduk sekitar sehingga derasnya aliran membuat sampah tersebut menyangkut dan mengikis lapisan permukaan Sehingga Pengelolaan sampah terutama pada kawasan perkotaan menjadi permasalahan yang sangat kompleks. Sampah menurut Pasal 1 butir 20 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang menyatakan bahwa Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Segala aktivitas masyarakat selalu

⁵ Etik Iriani Purbaningsi, 2007, *Kajian Sistem Mitigasi Bencana Banjir Kali Bekasi*, Tesis, Universitas Gadjah Mada.

⁶ Nurlai, mmmmmmmliyah Putri Jauhari, 2022, *Pemetaan Area Rawan Banjir DAS Bekasi Menggunakan Metode Kuantitatif Berjenjang Tertimbang*, Tesis, Universitas Gadjah Mada.

menimbulkan sampah. Permasalah-permasalahan yang menjadi cukup diperhatikan yaitu kepedulian masyarakat (human behaviour) yang masih sangat rendah terhadap Pengelolaan sampah.

Sungai yang Seharusnya bagi Kota besar seperti Bekasi, bantaran sungai dijadikan sebagai perlindungan tata air, sebagai pengendalian erosi serta dapat mencegah terjadinya bencana alam seperti banjir dan tanah longsor. Akibat dari bencana banjir tersebut hampir seluruh kecamatan di kota Bekasi terdampak banjir. BPBD Kota Bekasi mencatat terdapat 20 titik di 7 kecamatan Kota Bekasi Kecamatan yang terdampak meliputi Jatiasih, Bekasi Selatan, Bekasi Timur, Bekasi Utara, Bantar Gebang, Pondok Gede, dan Rawa Lumbu. Dampak yang terjadi akibat banjir tersebut kerusakan lingkungan yang cukup besar Jalan di sekitar Jembatan Kemang Pratama, Kota Bekasi, mengalami ambles akibat banjir besar, terdapat lubang besar yang disebabkan oleh amblesnya jalan sejumlah properti di Mal Giant hanyut terbawa arus, menimbulkan korban jiwa, selain itu menurut Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bekasi penyakit yang paling banyak diderita masyarakat akibat banjir melanda, yaitu batuk, pilek, gatal-gatal akibat kontak dengan air banjir. Sehingga Berbagai upaya harus dilakukan dengan baik oleh pemerintah melalui instansi terkait, swasta, maupun masyarakat dalam rangka pengelolaan sampah sebagai upaya pengendalian banjir di Kota Bekasi.

Pengendalian yang dilakukan pemerintah Kota Bekasi yaitu melakukan pencegahan, penanggulangan, pemulihan. mengupayakan penanggulangan banjir di Kota Bekasi dengan kebijakan seperti Normalisasi sungai yang melewati daerah rawan

banjir, membangun tanggul di bantaran sungai, memasang sistem peringatan dini banjir yang terdiri dari lima stasiun pemantauan di sepanjang Sungai Cileungsi dan Cikeas, Melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk tidak membawa sampah sembarangan.⁷ Dalam rapat koordinasi, pemerintah juga menyusun rencana strategi dalam penanganan banjir yaitu dilakukan dengan tiga tahapan. Untuk tahapan jangka pendek, pemerintah akan melakukan rekayasa cuaca karena pembangunan fisik tidak memungkinkan saat curah hujan masih tinggi. Sedangkan pada jangka menengah, pemerintah berencana membangun polder atau sistem penghubung air di permukiman warga untuk mengurangi genangan. Dan untuk tahapan jangka panjang, pemerintah bakal merehabilitasi daerah hulu di Bogor-Puncak-Cianjur (Bopuncur) sebagai sumber air serta pengerukan sungai secara rutin untuk mencegah sedimentasi.⁸ Menko PMK mengatakan bahwa upaya pemulihan dilakukan secara menyeluruh, mulai dari penyaluran bantuan, perbaikan infrastruktur, hingga langkah mitigasi untuk mencegah bencana serupa terjadi di masa depan.⁹

Namun, kenyataan yang masih terjadi saat musim penghujan banjir di Kota Bekasi tetap terus terjadi bahkan menimbulkan kerusakan lingkungan yang semakin parah bahkan menimbulkan korban jiwa. Dalam kenyataan yang terjadi peran Dinas

⁷ Muhammad Ali, dkk., 2022, “ Implementasi Kebijakan Penanggulangan Banjir Di Kota Bekasi”, JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan, Vol. 6/ No. 4/ November/2022, Universitas Singaperbangsa Karawang, hlm. 2138

⁸ <https://radarbekasi.id/2025/03/07/pemerintah-fokus-penanganan-banjir-jangka-panjang-di-kota-bekasi/>, diakses 28 September 2025.

⁹ *Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan Republik Indonesia (KEMENKO PKM)*, Pemerintah Gerak Cepat Pulihkan Dampak Banjir di Bekasi, <https://share.google/onwPwYRmtKUJ4ms8I>, diakses 28 September 2025

Lingkungan Hidup dalam melakukan pengawasan tidak dilakukan dengan efektif, salah satunya yaitu pengawasan sampah terutama di sungai dan aliran sungai. Berkaitan dengan hal tersebut maka lembaga yang secara tugas, pokok dan fungsi berkaitan dengan penanganan banjir salah satunya yaitu Dinas Lingkungan Hidup dimana bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap lingkungan hidup terhadap kualitas lingkungan di Kota Bekasi, seperti menjaga kebersihan di daerah aliran sungai maupun taman-taman dan pengelolaan sampah terutama di daerah aliran sungai maupun di sempadan sungai.

Selain Dinas – Dinas yang terkait masyarakat juga ikut serta dalam melindungi Sungai Bekasi sebagaimana yang tertulis di Pasal 70 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hukum (UUPLH) yaitu “Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup”. Karena masyarakat pengguna dan penikmat langsung sumber daya alam tersebut. Sehingga sangatlah penting untuk mengkaji kerusakan lingkungan akibat banjir yang terjadi Kota Bekasi.

berdasarkan latar belakang diatas maka penulis ingin melakukan penelitian terikat dengan pengelolaan sampah sebagai upaya pengendalian banjir, dengan judul “peran Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah di sungai Bekasi sebagai upaya pengendalian banjir di kota bekasi”. Penelitian ini juga akan mengeksplorasi pengelolaan sampah di sungai, kendala, serta solusi Dinas Lingkungan Hidup dalam pengendalian banjir di Kota Bekasi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah diatas, maka perumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah di Sungai Bekasi sebagai upaya pengendalian banjir di kota Bekasi ?
2. Apakah ada kendala yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah di Sungai Bekasi sebagai upaya pengendalian banjir di Kota Bekasi.

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengetahui Peran Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah di Sungai Bekasi sebagai upaya pengendalian banjir di Kota Bekasi Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dapat dirumuskan tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Peran Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah di Sungai Bekasi sebagai upaya pengendalian banjir di Kota Bekasi
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah di Sungai Bekasi sebagai upaya pengendalian banjir di Kota Bekasi

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat Teoritis :

Penelitian ini diharapkan memberikan wawasan baru dan manfaat maupun ilmu bagi perkembangan ilmu hukum dan perkembangan bidang hukum lingkungan hidup, khususnya pengelolaan sampah di Sungai Bekasi sebagai upaya pengendalian banjir di Kota Bekasi. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian lain yang berkaitan.

2. Manfaat Praktis :

a. Bagi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi

Berdasarkan dari penelitian ini diharapkan memberikan saran masukan atau referensi dan memberikan pertanggungjawaban yang lebih kepada Dinas Lingkungan Hidup terutama dalam pengelolaan sampah di sungai bekasi sebagai upaya pengendalian banjir di Kota Bekasi.

b. Bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi

Penelitian ini diharapkan memberikan bahan pertimbangan dan bisa menjadi bahan evaluasi dalam menentukan kebijakan mengenai upaya pengendalian banjir di Kota Bekasi dan bisa menjadi bahan evaluasi mengenai peraturan terikat lingkungan

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan , pemahaman dan kesadaran bagi masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, terutama dalam membuang sampah pada tempatnya. Dengan penelitian ini, masyarakat bisa lebih memahami peran mereka yang sangat penting dalam mengurangi pencemaran sampah.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian Penulis dengan judul “ peran dinas lingkungan hidup dalam pengelolaan sampah di Kali Bekasi sebagai upaya pengendalian banjir di kota Bekasi.” merupakan hasil karya asli penulis bukan hasil dari duplikasi maupun plagiasi penelitian orang lain. Berkaitan dengan rencana penelitian penulis, penelitian membandingkan 3 (tiga) penulisan hukum/skripsi yang memiliki topik serupa, yaitu:

- a) Judul Penulisan Pemerintah Daerah Dan Masalah Banjir: Studi atas peran badan penanggulangan bencana daerah (BPBD) dalam penanganan Bencana banjir di Kelurahan Duren Jaya Kota Bekasi Tahun 2020

b) Identitas Penulis

- | | |
|------------------|-------------------|
| 1) Nama | Rizka Tiara Putri |
| 2) NPM | 11201120000029 |
| 3) Program Studi | Ilmu politik |
| 4) Tahun | 2024 |

- c) Rumusan Masalah Bagaimana peran BPBD Kota Bekasi dalam upaya penanganan banjir di kelurahan Duren Jaya tahun 2020?
- d) Kesimpulan 1. Tingkat ketaatan masyarakat terhadap imbauan yang diberikan oleh BPBD Kota Bekasi cukup baik dan berperan. Hal ini terbukti atas tingkat kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan di Kelurahan Duren Jaya .
2. Metode yang digunakan dalam mengatasi banjir adalah dengan membangun sumur resapan dan menormalisasi sungai. Hal ini terjadi atas kerjasama antara BPBD Kota Bekasi, Dinas Lingkungan, dan Masyarakat setempat.
3. Prosedur Rutin BPBD Kota Bekasi seperti sosialisasi di sekolah dan pertemuan antar masyarakat, telah dilakukan oleh BPBD Kota Bekasi dengan rutin. Hal ini terbukti bahwa BPBD Kota Bekasi sangat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana.

4. Dalam menjalankan sebuah proses upaya penanganan banjir oleh BPBD Kota Bekasi, terdapat faktor penghambat yaitu ketidakmampuan BPBD Kota Bekasi untuk mengevaluasi korban banjir. Hal ini disebabkan karena letak geografis Kelurahan Duren Jaya yang terkena banjir dan kurangnya koordinasi anatar masyarakat, sehingga mengurangi kinerja BPBD Kota Bekasi.

a) Judul penulisan Kajian dampak perilaku pengelolaan sampah masyarakat terhadap kontribusi pengendalian banjir di daerah aliran sungai bringin semarang

b) Identitas

- 1) Nama Zulfa Nourotin Nada
- 2) NPM C.511.18.0016
- 3) Program Studi Perencanaan wilayah dan kota
- 4) Perguruan UNIVERSITAS SEMARANG
Tinggi
- 5) Tahun 2024

- c) Rumusan Masalah
1. Bagaimana perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah di daerah aliran Sungai Bringin, Semarang?
 2. Apa saja faktor yang memengaruhi perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah di daerah aliran Sungai Bringin, Semarang?
 3. Bagaimana dampak perilaku pengelolaan sampah masyarakat terhadap risiko terjadinya banjir di daerah aliran Sungai Bringin, Semarang?
- d) Kesimpulan
- Kota Semarang dikenal dengan kehidupan yang sibuk dan penuh aktivitas. Namun, bersamaan dengan kegiatan yang intens, muncul masalah serius dalam pengelolaan sampah. Sikap kurang peduli masyarakat dalam membuang sampah ke Sungai Bringin atau kurangnya pengelolaan sampah yang efektif, menyebabkan penumpukan sampah di sepanjang aliran sungai tersebut. Pengelolaan sampah menjadi salah satu tantangan besar di lingkungan perkotaan, dimana perilaku masyarakat memainkan peran penting dalam menentukan kondisi lingkungan sekitarnya,

termasuk dalam mitigasi banjir. Dengan fokus pada Kota Semarang, terutama di sekitar Sungai Bringin yang memiliki peran krusial dalam sistem drainase kota, penyumbatan atau pendangkalan akibat sampah dapat secara signifikan meningkatkan risiko banjir. Dampaknya, aliran sungai menjadi terhambat dan kemampuannya dalam menampung air saat hujan lebat menjadi terbatas, yang pada akhirnya meningkatkan potensi banjir di sekitar Sungai Bringin. Tambahan lagi, penumpukan sampah di sungai mencemari air, menimbulkan bau tidak sedap, dan merusak keindahan lingkungan sekitar, dengan berdampak negatif pada kualitas hidup masyarakat yang tinggal di sekitar Sungai Bringin.

a) Judul Penulisan

Peran Dinas Lingkungan Hidup dalam pengawasan terhadap kegiatan masyarakat dalam pembuangan sampah berdasarkan perda nomor 7 tahun 2012 tentang pengelolaan sampah di sungai

Ciwulan desa tanjung kecamatan Kawalu Kota
Bekasi Tasikmalaya.

b) Identitas Penulis

- 1) Nama Silvia Damayanti
- 2) NPM 200513689
- 3) Program Studi Hukum
- 4) Perguruan Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Tinggi
- 5) Tahun 2023

- c) Rumusan Masalah
1. Bagaimana peran Dinas Lingkungan Hidup dalam pengawasan terhadap kegiatan masyarakat dalam pembuangan sampah berdasarkan Perda Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah di Sungai Ciwulan Desa Tanjung Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya?
 2. Apa kendala dan solusi yang dialami Dinas Lingkungan Hidup dalam pengawasan terhadap kegiatan masyarakat dalam pembuangan sampah berdasarkan Perda Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah di Sungai Ciwulan Desa Tanjung Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya?

d) Kesimpulan

1. Peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Tasikmalaya dalam pengawasan terhadap kegiatan masyarakat dalam pembuangan sampah berdasarkan Perda Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Di Sungai Ciwulan Desa Tanjung Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya tidak berjalan dengan baik. Pengawasan pengelolaan sampah meliputi kegiatan pengurangan sampah dan penanganan sampah. Pengurangan sampah meliputi 3R (reduce, reuse, recycle) dan penanganan sampah meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah. Fasilitas pengangkutan sampah di Sungai Ciwulan masih kurang dan terbatas. Hal ini menyebabkan banyaknya tumpukan sampah karena tidak seluruh sampah terangkut.

2. Kendala Dinas Lingkungan Hidup Kota Tasikmalaya dalam pengawasan pengelolaan sampah seperti kurangnya sumber daya manusia, keterbatasan anggaran, kurangnya sarana dan

prasarana, kurang optimalnya sosialisasi yang diberikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Tasikmalaya dan kurangnya edukasi mengenai dampak negatif yang dapat mempengaruhi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat

Perbedaan rencana penelitian penulis dengan 3 penelitian terdahulu yaitu penelitian pertama berfokus kepada upaya BPBD Kota Bekasi dalam upaya penanganan banjir di tahun 2020 terutama di kelurahan Duren Jaya, penelitian kedua berfokus kepada perilaku manusia dalam pengelolaan sampah di daerah aliran Sungai Bringin, di Kota Semarang, penelitian ketiga peran Dinas Lingkungan Hidup dalam pengawasan terhadap kegiatan masyarakat dalam pembuangan sampah berdasarkan Perda Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah di Sungai Ciwulan Desa Tanjung Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya, sedangkan rencana penelitian penulis berfokus kepada mengenai peran Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah di sungai Bekasi sebagai upaya pengendalian banjir di Kota Bekasi jadi bukannya hanya berfokus kepada peran dinas lingkungan hidup dalam pengelolaan sampah di sungai Bekasi tetapi juga berfokus mengenai pengendalian banjir di Kota Bekasi.

F. Batasan Konsep

1. Dinas Lingkungan Hidup

Berdasarkan Pasal 1 angka 9 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.74/Menlhk/Sejen/Kum.1/8/2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan. menjelaskan bahwa Dinas Lingkungan Hidup adalah perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota di bidang lingkungan hidup.

2. Pengelolaan sampah

Mengacu pada Pasal 1 Angka 5 UU Nomor 18 Tahun 2008, pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.

3. Sungai

Berdasarkan Pasal 1 butir 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai menyatakan bahwa pengertian Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh Garis Sempadan.

4. Pengendalian

Pengendalian dalam Pasal 13 ayat (1) UUPPLH dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup. Pengendalian pencemaran meliputi :

- a. pencegahan;
- b. penanggulangan; dan
- c. pemulihan

5. Banjir

Dalam bahasa Indonesia, banjir didefinisikan sebagai peristiwa terbenamnya daratan (yang biasanya kering) karena volume air yang meningkat. Definisi ini tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).¹⁰

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

penelitian dalam penulisan hukum ini “ Peran Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah di Sungai Bekasi sebagai upaya pengendalian banjir di Kota Bekasi.” penulis menggunakan metode penelitian hukum empiris, yaitu Penelitian hukum empiris berfokus pada fakta sosial. Penelitian empiris memerlukan data primer sebagai data utama dan didukung dengan data sekunder.

¹⁰ kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://kbbi.web.id/banjir>, diakses pada tanggal 2 oktober 2025.

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian hukum empiris ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung melalui wawancara dengan instansi terkait dan masyarakat. Sedangkan Data Sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada.¹¹

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden atau narasumber melalui metode seperti wawancara, kuisioner, observasi, atau pengamatan langsung di Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi. Data primer dikumpulkan secara khusus dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber dan responden telah disiapkan terlebih dahulu agar memperoleh data yang berkaitan untuk tujuan penelitian atau studi tertentu serta belum pernah dipublikasikan sebelumnya.

b. Data Sekunder

Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sebagai berikut:

¹¹ Muhammad Syahrur, 2022, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis.*, DotPlus, Riau, hlm.45.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan sumber data sekunder yang diperoleh dari peraturan Perundang-undangan. Beberapa contoh bahan hukum primer yang relevan untuk perlindungan lingkungan hidup antara lain:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28H ayat (1) yang berbunyi “bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.
- b) Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia (untuk selanjutnya disebut dengan UUD 1945) Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) mengatur bahwa bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
- c) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
- d) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- e) Peraturan pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang sungai.

- 
- f) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.74/Menlhk/Sejen/Kum.1/8/2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan.
- g) Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 20 Tahun 2019 tentang pengelolaan Daerah Aliran Sungai.
- h) Peraturan Daerah (Perda) Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2011 tentang pengelolaan sampah di Kota Bekasi.
- i) Peraturan Daerah (perda) Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi, Dinas Lingkungan dan Kehutanan Kabupaten Kota Bekasi.
- j) Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 30 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Bekasi.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari buku-buku, hasil penelitian, pendapat hukum yang membahas

mencari, mempelajari, dan menganalisis data yang berkaitan dengan Pengendalian banjir dan Pengelolaan Lingkungan Hidup khususnya pengelolaan sampah. Penggunaan bahan hukum primer dan sekunder yang relevan dalam penelitian atau studi penting untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang peraturan-peraturan dan pendapat ahli dalam bidang lingkungan hidup.

3. Cara pengumpulan data

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu cara untuk mengumpulkan data dari buku, pendapat para ahli, dan sumber-sumber resmi yang terkait dengan permasalahan hukum yang diteliti.

b. Wawancara

Wawancara yaitu cara pengumpulan data dengan mengajukan sejumlah pertanyaan kepada narasumber secara lisan sebagai pedoman untuk memperoleh keterangan secara lengkap mengenai permasalahan hukum yang diteliti, serta dimungkinkan ada variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi pada waktu wawancara. Narasumber merupakan subjek yang memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti berupa pendapat hukum berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian tentang Dinas Lingkungan Hidup dalam Pengelolaan Sampah di Sungai Bekasi sebagai upaya pengendalian banjir akan dilakukan di Kota Bekasi.

5. Narasumber dan Responden

a. Narasumber

Narasumber merupakan seseorang yang memberikan jawaban atau pendapat atas pertanyaan mengenai objek yang diteliti guna melengkapi data yang diperoleh dari responden. Narasumber dalam penelitian ini adalah Idham Kholid, S.Sos, selaku Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi.

b. Responden

Responden dalam penelitian ini merupakan orang yang terkait secara langsung dengan data yang dibutuhkan. Responden dalam penelitian ini adalah AANN Saepulloh Koordinator Administrasi Khusus Sungai Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi dan . Febri susanto Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat, Kelurahan Pengasinan Kota Bekasi

6. Analisis Data

Data yang dikumpulkan dari penelitian menggunakan analisis kualitatif, yaitu cara menganalisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu data yang dinyatakan oleh narasumber secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari dan proses penalaran. Menarik kesimpulan digunakan metode berpikir deduktif, yaitu mendasarkan pada pola pemikiran umum ke pemikiran yang lebih khusus.

